

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pendaftaran NPWP Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-99/Jambi/Pelayanan

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Sederhana Badan (Domisili di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan): a. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri atau Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing. b. Dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi: jika WNI melampirkan fotokopi Kartu NPWP; dan jika WNA melampirkan fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP (dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak)
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation): a. Fotokopi perjanjian Kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation); b. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memilih NPWP; c. Dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) meliputi: jika WNI melampirkan fotokopi Kartu NPWP; dan jika WNA melampirkan fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP (dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak)
3. Cabang Wajib Pajak Badan: a. Fotokopi Kartu NPWP pusat; b. Dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang meliputi: jika WNI melampirkan fotokopi Kartu NPWP; dan jika WNA melampirkan fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP (dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak)
4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa: a. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau b. Bagi Warga Negara Asing, yaitu Fotokopi paspor dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
5. Untuk Wajib Pajak orang pribadi Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP
6. Untuk Wajib Pajak Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, berupa: a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri; c. Fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; dan d. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
7. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain: A. Wanita kawin yang: 1) Melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, 2) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jambi Pelayanan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan. Dalam hal Pelaku Usaha Badan mengajukan secara elektronik, permohonan diajukan oleh Pelaku Usaha Badan dengan status pusat melalui Notaris yang membuat akta pendirian Badan tersebut dan telah diberikan hak akses pada SABH.
3. Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (<https://ereg.pajak.go.id>)
4. Tertulis disampaikan: a. Secara langsung; b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran Wajib Pajak.
5. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui: a. SABH yang terintegrasi dengan system informasi DJP untuk Wajib Pajak Badan; atau b. OSS yang terintegrasi dengan system informasi DJP. Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar.
6. Wajib Pajak yang telah memenuhi: a. Persyaratan subjektif, yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH; dan b. Persyaratan objektif, yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh.
7. Pendaftaran dilakukan di KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi: a. Tempat tinggal Wajib Pajak; b. Tempat kedudukan Wajib Pajak; atau c. Tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
8. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan: a. Tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha, dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha; b. Tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada KPP tertentu; dan c. Tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tidak dipungut biaya Jambi Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP
2. Surat Keterangan Terdaftar
3. Surat Pemberitahuan Non Efektif
4. Surat Konfirmasi

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya